Perubahan
Rencana Kerja

Tahun 2024

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Nganjuk

bkkbn BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif #bangga melayani bangsa

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ /K/411.013/2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjembatani rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Tahun 2024 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

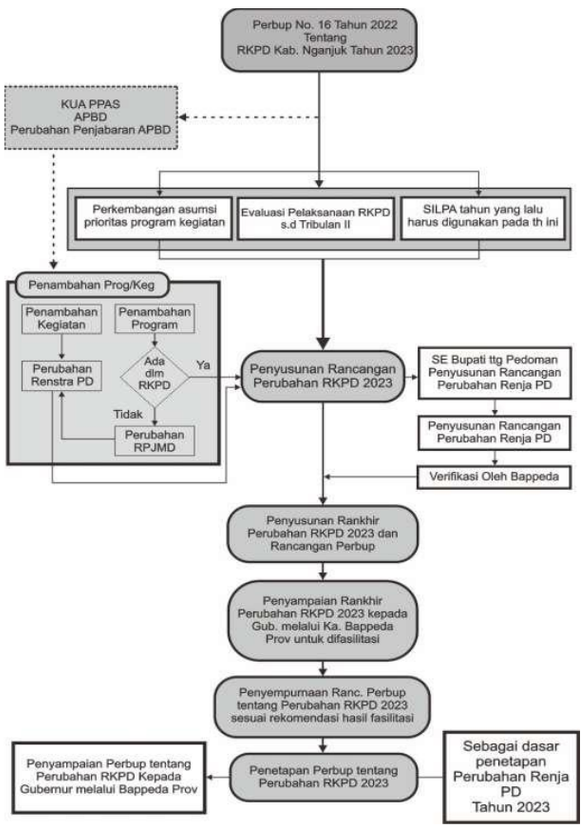
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau

c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, secara diagramatik diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.

Diagram Alir Perubahan Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta didasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil Renja sampai Triwulan II tahun berkenaan, pada akhirnya Perubahan Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja (RKA-SKPD) untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga;
19. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas;
33. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
39. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
40. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
41. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
42. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Menetapkan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Triwulan II Tahun 2024;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;

c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2024.
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
- 3.2. Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun Berkenaan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan II Tahun 2024 mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024

(Target Berdasarkan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2024-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%) Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = 8		11 = (10/4)
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**															
2.14.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**															
2.14.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**86,00**	**Nilai**	**82,58**	**Nilai**	**82,00**	**Nilai**	**80,50**	**Nilai**	**98,17%**	**82,00**	**Nilai**	**80,50**		**-**
2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**33**	**Dokumen**	**45**	**Dokumen**	**11**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**9,09%**	**11**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**3,03%**
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	15	Dokumen	3	Dokumen	-	Dokumen	-	3	Dokumen	-	Dokumen	-
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Dokumen	10	Dokumen	4	Dokumen	-	Dokumen	-	4	Dokumen	-	Dokumen	0,00%
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	20	Laporan	4	Laporan	1	Laporan	25,00%	4	Laporan	1	Laporan	8,33%
2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**61**	**Laporan**	**50**	**Laporan**	**32**	**Laporan**	**30**	**Dokumen**	**93,75%**	**32**	**Laporan**	**30**	**Dokumen**	**49,18%**
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	Orang	31	Orang	31	Orang	31	Orang	100%	31	Orang	31	Orang	100%
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15	Laporan	25	Laporan	5	Laporan	-	Laporan	-	5	Laporan	-	Laporan	-
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15	Laporan	25	Laporan	5	Laporan	-	Laporan	-	5	Laporan	-	Laporan	0,00%
2.14.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**31**	**Dokumen**	**9**	**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**50,00%**	**2**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**3,23%**
2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31	Orang	99	Orang	2	Orang	1	Orang	50,00%	31	Orang	1	Orang	3%
2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**99**	**Dokumen**	**159**	**Dokumen**	**33**	**Dokumen**	**19**	**Dokumen**	**57,58%**	**33**	**Dokumen**	**19**	**Dokumen**	**19,19%**
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	5	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	1	Paket	33,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2024-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%) Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = 8		11 = (10/4)
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket	5	Paket	1	Paket	-	Paket	-	1	Paket	-	Paket	0,00%
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	5	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	1	Paket	33,33%
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	5	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	1	Paket	33,33%
2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	20	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	4	Dokumen	4	Dokumen	33,33%
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	33	Laporan	55	Laporan	11	Laporan	-	Laporan	-	11	Laporan	-	Laporan	0,00%
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	60	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	12	Laporan	6	Laporan	16,67%
2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	-	Dokumen	-	2	Dokumen	-	Dokumen	0,00%
2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**108**	**Laporan**	**180**	**Laporan**	**36**	**Laporan**	**15**	**Laporan**	**41,67%**	**36**	**Laporan**	**15**	**Laporan**	**13,89%**
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan	60	Laporan	12	Laporan	3	Laporan	25,00%	12	Laporan	3	Laporan	8,33%
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	60	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	12	Laporan	6	Laporan	16,67%
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	60	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	12	Laporan	6	Laporan	16,67%
2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**81**	**Unit**	**81**	**Unit**	**81**	**Unit**	**81**	**Unit**	**100%**	**81**	**Unit**	**81**	**Unit**	**100%**
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81	Unit	81	Unit	81	Unit	81	Unit	100%	81	Unit	81	Unit	100%
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	Unit	75	Unit	10	Unit	6	Unit	60,00%	10	Unit	6	Unit	13,33%
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	Unit	5	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	1	Unit	100%
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi**	**98,75%**		**-**	**-**	**84,29%**		**70,24%**		**83,33%**	**84,29%**		**70,24%**		**83,33%**
		Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal	**9 Sekolah Siaga Kependudukan**		**-**	**-**	**3**	**Sekolah Siaga Kependuduka**	**3**	**Sekolah Siaga Kependuduka**	**100%**	**3**	**Sekolah Siaga Kependud**	**3**	**Sekolah Siaga Kependudu**	**100%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2024-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%) Triwulan II Tahun 2024				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10 = 8		11 = (10/4)
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jumlah Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**36**	**Kegiatan**	**4**	**Kegiatan**	**9**	**Kegiatan**	**5**	**Kegiatan**	**55,56%**		**9**	**Kegiatan**	**5**	**Kegiatan**	**13,89%**
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	12	Satuan Pendidikan	3	Satuan Pendidikan	3	Satuan Pendidikan	3	Satuan Pendidikan	100%		3	Satuan Pendidikan	3	Satuan Pendidikan	25,00%
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	-	Laporan	-		3	Laporan	-	Laporan	0,00%
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	12	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	2	Dokumen	66,67%		3	Dokumen	2	Dokumen	16,67%
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah**	**Jumlah Laporan Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun**	**72**	**Laporan**	**51**	**Laporan**	**36**	**Laporan**	**18**	**Laporan**	**50,00%**		**36**	**Laporan**	**18**	**Laporan**	**25,00%**
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	36	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%		12	Laporan	6	Laporan	16,67%
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	Laporan	3	Data	12	Laporan	6	Laporan	50,00%		12	Laporan	6	Laporan	-
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	36	Dokumen	36	Dokumen	12	Dokumen	6	Dokumen	50,00%		12	Dokumen	6	Dokumen	16,67%
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Peserta KB Aktif**	**80,07%**		**77,12%**		**80,05%**		**76,49%**		**95,55%**		**80,05%**		**76,49%**		**95,53%**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jumlah Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**21**	**Kegiatan**	**30**	**Dokumen**	**6**	**Kegiatan**	**6**	**Kegiatan**	**100%**		**6**	**Kegiatan**	**6**	**Kegiatan**	**28,57%**
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3	Laporan	22	Laporan	12	Laporan	-	Laporan	-		12	Laporan	-	Laporan	0%
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	-	Laporan	60	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%		12	Laporan	6	Laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2024-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%) Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = 8		11 = (10/4)
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	Laporan	80	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	12	Laporan	6	Laporan	-
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	18	Dokumen	30	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	6	Dokumen	6	Dokumen	33,33%
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	Organisasi	25	Dokumen	5	Organisasi	5	Organisasi	100%	5	Organisasi	5	Organisasi	-
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang**	**5160 Kader**		**5160 Kader**		**5160 Kader**		**5160 Kader**		**100%**	**5160 Kader**		**5160 Kader**		**100%**
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	5160 Kader		5160 Kader		5160 Kader		5160 Kader		100%	5160 Kader		5160 Kader		100%
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Akseptor yang Terlayani**	**435.000 Orang**		**724.123 Orang**		**140.000**	**Orang**	**133.017**	**Orang**	**95,01%**	**140.000**	**Orang**	**133.017**		**-**
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36	Laporan	36	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	12	Laporan	6	Laporan	16,67%
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	435.000 Orang		724.123 Orang		140.000	Orang	133.017	Orang	95,01%	140.000	Orang	133.017		-
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	6	Laporan	10	Laporan	2	Laporan	-	Laporan	-	2	Laporan	-	Laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2024-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%) Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = 8		11 = (10/4)
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	Laporan	76	Laporan	12	Laporan	6	Laporan	50,00%	12	Laporan	6	Laporan	-
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB**	**49**	**Kampung KB**	**49**	**Kampung KB**	**49**	**Kampung KB**	**49**	**Kampung KB**	**100%**	**49**	**Kampung KB**	**49**	**Kampung KB**	**100%**
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	Dokumen	-	-	1	Dokumen	-	Dokumen	-	1	Dokumen	-	Dokumen	-
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	49	Kampung KB	49	Kampung KB	49	Kampung KB	49	Kampung KB	100%	49	Kampung KB	49	Kampung KB	100%
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**1. Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R)**	**89,03%**		**-**		**89,01%**		**57,21%**		**64,27%**	**89,01%**		**57,21%**		**64,27%**
		2. Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun	**10,00%**		**7,77%**		**10,20%**		**5,71%**		**178,63%**	**10,20%**		**5,71%**		**178,63%**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Kelompok Kegiatan yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**5 Kelompok Kegiatan**		**5 Kelompok Kegiatan**		**5 Kelompok Kegiatan**		**5 Kelompok Kegiatan**		**100%**	**5 Kelompok Kegiatan**		**5 Kelompok Kegiatan**		**100%**
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	18	Laporan	10	Laporan	4	Laporan	2	Laporan	50,00%	4	Laporan	2	Laporan	11,11%
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	Laporan	-	-	3	Laporan/ Dokumen	3	Laporan/ Dokumen	100%	-	Laporan/ Dokumen	3	Laporan/ Dokumen	-
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	18	Laporan	25	Laporan	5	Laporan	2	Laporan	40,00%	5	Laporan	2	Laporan	11,11%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/Kegiatan (*output*)/Sub Kegiatan (*Sub Output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun (2024-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2023)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun (2024)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun (2024)		Tingkat Realisasi (%) Triwulan II Tahun 2024			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9		10 = 8		11 = (10/4)
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	-	Unit	49	Unit	25	Unit	-	Unit	-	25	Unit	-	Unit	-
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	180	Orang	100	Orang	50	Orang	20	Orang	40,00%	50	Orang	20	Orang	0
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**-**	**Organisasi**	**-**	**-**	**5**	**Organisasi**	**-**	**Organisasi**	**-**	**5**	**Organisasi**	**-**	**Organisasi**	**-**
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	Laporan	-	-	12	Laporan/ Dokumen	-	Laporan/ Dokumen	-	12	Laporan/ Dokumen	-	Laporan/ Dokumen	-
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	Laporan	-	-	12	Laporan/ Dokumen	-	Laporan/ Dokumen	-	12	Laporan/ Dokumen	-	Laporan/ Dokumen	-

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98,17%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	**Implikasi Terhadap Target Renstra PD**	**Kebijakan Yang Diambil**
Masih dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan	Target bisa terpenuhi.	Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal yang sudah ditentukan.
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	95,55%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	**Implikasi Terhadap Target Renstra PD**	**Kebijakan Yang Diambil**
Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal.	Target bisa terpenuhi.	Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal yang sudah ditentukan.

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Pengendalian Penduduk	91,66	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	**Implikasi Terhadap Target Renstra PD**	**Kebijakan Yang Diambil**
Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal.	Target bisa terpenuhi.	Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal yang sudah ditentukan.
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	121,45%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	**Implikasi Terhadap Target Renstra PD**	**Kebijakan Yang Diambil**
Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal.	Target bisa terpenuhi.	Melakukan kegiatan sesuai dengan Jadwal yang sudah ditentukan.

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 (s.d Bulan April 2024)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja pelayanan Dinas PPKB Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (*core bussiness*) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024 (TW II s.d April)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
1.	Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,88	1,83	1,73	1,72	-	TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Sehingga realisasinya tidak bisa dibagi per Tribulan/per Semester.
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	-	80,04%	80,01%	80,02%	80,03%	80,04%	80,05%	79,36%	78,46%	78,17%	77,12%	76,49%	- Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang Hamil. - Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin mempunyai anak segera.
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	-	11,50%	-	-	-	-	11,40%	9,20%	9,66%	10,05%	-	10,25%	- Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb. - Usia masih dalam range Pasangan Usia Subur (PUS), tetapi yang bersangkutan merasa sudah manopouse.
4.	Prosentase Keluarga yang ber-KB yang Mengikuti Kelompok Kegiatan	-	-	-	87,00%	88,00%	89,00%	-	-	76,54%	81,29%	43,69%	-	- Anggota Kelompok Kegiatan belum tentu berstatus Pasangan Usia Subur (PUS). - Anggota Kelompok Kegiatan yang berstatus Pasangan Usia Subur (PUS) tetapi ingin mempunyai anak segera.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Beberapa isu-isu strategis dalam pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang menjadi skala prioritas adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk menekan kasus kelahiran perempuan dibawah usia 21 tahun.
2. Kesadaran masyarakat untuk mengendalikan kelahiran semakin meningkat.
3. Dukungan pemerintah dan peran masyarakat dalam menekan unmeet need semakin kuat.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

Sumber : Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah "**NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"**, dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Nganjuk yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Beretika dan Berbudaya
2. Mewujudkan Nganjuk yang Berdaya Saing
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai
6. Mewujudkan Nganjuk yang Asri, Nyaman dan Lestari

Pelaksanaan jangka menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan ke-2, yaitu "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing" serta sasaran strategis daerah "Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat".

Untuk menjalankan Strategi dan Arah Kebijakan guna mencapai Sasaran RPD, maka disusun Program Pembangunan Daerah yang mencakup Program Unggulan berdasarkan prioritas dan

identifikasi isu strategis daerah dan telah disepakati bersama dalam Forum Konsultansi Publik, serta merupakan Program Perangkat Daerah yang bersifat strategis yang outcome-nya mendukung langsung dengan Sasaran RPD maupun sesuai dengan visi misi RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 dan selaras dengan arahan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMN 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024.

Dengan demikian, program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Adapun program prioritas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
2. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan kesejahteraan sosial
3. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan kesejahteraan sosial
4. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan kualitas Pendidikan
6. Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup
7. Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah
8. Peningkatan dan Penguatan Perekonomian Daerah
9. Pengembangan Agropolitan dan food estate
10. Pelestarian Seni Budaya Lokal
11. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif
12. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi dan Kualitas
13. Pelayanan Publik.
14. Menjaga stabilitas sosial politik dan kesiapsiagaan
15. terhadap bencana
16. Percepatan Transformasi Digital

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Perubahan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah “Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas”, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,35
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2024**
Meningkatkan Keluarga Berencana yang Berkualitas	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,00
	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,05
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,40

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk tahun 2024 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tabel berikut :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp. 17.712.286.880	Rp. 221.612.250			Rp. 17.933.899.130	Rp. 28.031.417.880	Rp. 221.612.250			Rp. 28.253.030.130	Rp. 19.631.525.500,00
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				Rp. 17.712.286.880	Rp. 221.612.250			Rp. 17.933.899.130	Rp. 28.031.417.880	Rp. 221.612.250			Rp. 28.253.030.130	Rp. 19.631.525.500,00
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 7.142.317.960	Rp. 204.942.250			Rp. 7.347.260.210	Rp. 6.424.344.960	Rp. 204.942.250			Rp. 6.629.287.210	Rp. 7.939.225.500,00
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 15.010.800				Rp. 15.010.800	Rp. 15.010.800				Rp. 15.010.800	Rp. 16.522.000,00
2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.669.800				Rp. 3.669.800	Rp. 3.669.800				Rp. 3.669.800	Rp. 4.037.000,00
2	14	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.900.000				Rp. 3.900.000	Rp. 3.900.000				Rp. 3.900.000	Rp. 4.290.000,00
2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.441.000				Rp. 7.441.000	Rp. 7.441.000				Rp. 7.441.000	Rp. 8.195.000,00
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 4.615.535.000				Rp. 4.615.535.000	Rp. 3.798.046.000				Rp. 3.798.046.000	Rp. 4.856.191.000,00
2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.599.703.000				Rp. 4.599.703.000	Rp. 3.782.214.000				Rp. 3.782.214.000	Rp. 4.849.161.000,00
2	14	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.368.000				Rp. 10.368.000	Rp. 10.368.000				Rp. 10.368.000	Rp. 3.530.000,00
2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.464.000				Rp. 5.464.000	Rp. 5.464.000				Rp. 5.464.000	Rp. 3.500.000,00
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 203.890.000				Rp. 203.890.000	Rp. 193.370.000				Rp. 193.370.000	Rp. 174.062.500,00
2	14	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												Rp. 24.062.500,00
2	14	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 203.890.000				Rp. 203.890.000	Rp. 193.370.000				Rp. 193.370.000	Rp. 150.000.000,00
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 321.751.360	Rp. 204.942.250			Rp. 526.693.610	Rp. 338.377.360	Rp. 204.942.250			Rp. 543.319.610	Rp. 737.450.000,00
2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.113.960				Rp. 5.113.960	Rp. 5.113.960				Rp. 5.113.960	Rp. 5.500.000,00
2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 204.942.250			Rp. 204.942.250		Rp. 204.942.250			Rp. 204.942.250	Rp. 350.000.000,00
2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 77.632.350				Rp. 77.632.350	Rp. 77.808.350				Rp. 77.808.350	Rp. 71.000.000,00
2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.385.050				Rp. 10.385.050	Rp. 26.835.050				Rp. 26.835.050	Rp. 11.950.000,00
2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.500.000				Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000				Rp. 7.500.000	Rp. 8.500.000,00
2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.025.000				Rp. 7.025.000	Rp. 7.025.000				Rp. 7.025.000	Rp. 12.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 206.820.000				Rp. 206.820.000	Rp. 206.820.000				Rp. 206.820.000	Rp. 275.000.000,00
2	14	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.275.000				Rp. 7.275.000	Rp. 7.275.000				Rp. 7.275.000	Rp. 3.500.000,00
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
2	14	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa												
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 834.065.000				Rp. 834.065.000	Rp. 677.705.000				Rp. 677.705.000	Rp. 960.750.000,00
2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.625.000				Rp. 2.625.000	Rp. 2.625.000				Rp. 2.625.000	Rp. 12.000.000,00
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 70.200.000				Rp. 70.200.000	Rp. 91.800.000				Rp. 91.800.000	Rp. 135.000.000,00
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 761.240.000				Rp. 761.240.000	Rp. 583.280.000				Rp. 583.280.000	Rp. 813.750.000,00
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 1.152.065.800				Rp. 1.152.065.800	Rp. 1.401.835.800				Rp. 1.401.835.800	Rp. 1.194.250.000,00
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 174.831.800				Rp. 174.831.800	Rp. 186.297.800				Rp. 186.297.800	Rp. 190.500.000,00
2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 52.150.000				Rp. 52.150.000	Rp. 52.150.000				Rp. 52.150.000	Rp. 78.750.000,00
2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 925.084.000				Rp. 925.084.000	Rp. 1.163.388.000				Rp. 1.163.388.000	Rp. 925.000.000,00
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				Rp. 503.529.620	Rp. 16.670.000			Rp. 520.199.620	Rp. 1.002.641.620	Rp. 16.670.000			Rp. 1.019.311.620	Rp. 574.650.000,00
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				Rp. 100.004.620	Rp. 15.000.000			Rp. 115.004.620	Rp. 138.504.620	Rp. 15.000.000			Rp. 153.504.620	Rp. 129.150.000,00
2	14	02	2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.775.000				Rp. 50.775.000	Rp. 50.775.000				Rp. 50.775.000	Rp. 57.000.000,00
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.940.000				Rp. 14.940.000	Rp. 53.440.000				Rp. 53.440.000	Rp. 17.150.000,00
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 34.289.620	Rp. 15.000.000			Rp. 49.289.620	Rp. 34.289.620	Rp. 15.000.000			Rp. 49.289.620	Rp. 55.000.000,00
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 403.525.000	Rp. 1.670.000			Rp. 405.195.000	Rp. 864.137.000	Rp. 1.670.000			Rp. 865.807.000	Rp. 445.500.000,00
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 137.597.500				Rp. 137.597.500	Rp. 137.609.500				Rp. 137.609.500	Rp. 150.500.000,00
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 204.600.000				Rp. 204.600.000	
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 265.927.500	Rp. 1.670.000			Rp. 267.597.500	Rp. 521.927.500	Rp. 1.670.000			Rp. 523.597.500	Rp. 295.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				Rp. 9.288.939.300				Rp. 9.288.939.300	Rp. 14.069.620.300				Rp. 14.069.620.300	Rp. 9.932.150.000,00
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				Rp. 787.531.000				Rp. 787.531.000	Rp. 2.727.531.000				Rp. 2.727.531.000	Rp. 365.000.000,00
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 140.000.000				Rp. 140.000.000	
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 956.000.000				Rp. 956.000.000	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik - Insentif Fiskal	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 787.531.000				Rp. 787.531.000	Rp. 1.081.531.000				Rp. 1.081.531.000	Rp. 365.000.000,00
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 250.000.000				Rp. 250.000.000	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				Rp. 7.291.193.300				Rp. 7.291.193.300	Rp. 8.143.193.300				Rp. 8.143.193.300	Rp. 7.875.000.000,00
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.291.193.300				Rp. 7.291.193.300	Rp. 8.143.193.300				Rp. 8.143.193.300	Rp. 7.875.000.000,00
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 910.215.000				Rp. 910.215.000	Rp. 2.123.646.000				Rp. 2.123.646.000	Rp. 1.012.150.000,00
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.715.000				Rp. 11.715.000	Rp. 44.225.000				Rp. 44.225.000	Rp. 17.650.000,00
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 886.000.000				Rp. 886.000.000	Rp. 2.031.321.000				Rp. 2.031.321.000	Rp. 980.000.000,00
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.500.000				Rp. 12.500.000	Rp. 12.500.000				Rp. 12.500.000	Rp. 14.500.000,00
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 35.600.000				Rp. 35.600.000	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	Rp. 1.075.250.000				Rp. 1.075.250.000	Rp. 680.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								Tahun - 1	Tahun N									Tahun + 1
									Sebelum					Sesudah					
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 3.750.000				Rp. 3.750.000	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	Rp. 1.071.500.000				Rp. 1.071.500.000	Rp. 680.000.000,00
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				Rp. 777.500.000				Rp. 777.500.000	Rp. 6.534.811.000				Rp. 6.534.811.000	Rp. 1.185.500.000,00
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				Rp. 777.500.000				Rp. 777.500.000	Rp. 1.179.811.000				Rp. 1.179.811.000	Rp. 1.185.500.000,00
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 202.000.000				Rp. 202.000.000	Rp. 275.505.000				Rp. 275.505.000	Rp. 385.000.000,00
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 28.800.000				Rp. 28.800.000	
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 350.500.000				Rp. 350.500.000	Rp. 350.500.000				Rp. 350.500.000	Rp. 415.500.000,00
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 225.000.000				Rp. 225.000.000	Rp. 225.006.000				Rp. 225.006.000	Rp. 385.000.000,00
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									Rp. 5.355.000.000				Rp. 5.355.000.000	
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 2.550.000.000				Rp. 2.550.000.000	
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	- Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							Rp. 2.805.000.000				Rp. 2.805.000.000	
Jumlah									**Rp. 17.712.286.880**	**Rp. 221.612.250**			**Rp. 17.933.899.130**	**Rp. 28.031.417.880**	**Rp. 221.612.250**			**Rp. 28.253.030.130**	**Rp. 19.631.525.500,00**

Kab. Nganjuk, ...
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NAFHAN TOHAWI, SH., MH
NIP. 197212081998031005

Ada beberapa Perubahan pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2024, antara lain :

Analisis Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan Perubahan
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**17.933.899.130**	**28.253.030.130**	**10.319.131.000**	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**7.347.260.210**	**6.629.287.210**	**(717.973.000)**	
A	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**15.010.800**	**15.010.800**	**-**	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.669.800	3.669.800	-	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.900.000	3.900.000	-	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.441.000	7.441.000	-	
B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.615.535.000**	**3.798.046.000**	**(817.489.000)**	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.599.703.000	3.782.214.000	(817.489.000)	Pengurangan Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.368.000	10.368.000	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5.464.000	5.464.000	-	
C	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**203.890.000**	**193.370.000**	**(10.520.000)**	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	203.890.000	193.370.000	(10.520.000)	Pengurangan Anggaran
D	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**526.693.610**	**543.319.610**	**16.626.000**	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.113.960	5.113.960	-	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	204.942.250	204.942.250	-	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.632.350	77.808.350	176.000	Penambahan Anggaran untuk Bahan Komputer
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.385.050	26.835.050	16.450.000	Penambahan Anggaran untuk Cetak Lampiran SK Keluarga Beresiko Stunting (KRS)
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000	7.500.000	-	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.025.000	7.025.000	-	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.820.000	206.820.000	-	
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.275.000	7.275.000	-	
E	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**834.065.000**	**677.705.000**	**(156.360.000)**	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.625.000	2.625.000	-	

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan Perubahan
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	70.200.000	91.800.000	21.600.000	Penambahan Anggaran Belanja Tagihan Listrik
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	761.240.000	583.280.000	(177.960.000)	- Pengurangan Anggaran Honorarium Tenaga Kebersihan Balai Penyuluhan KB karena sudah teranggarkan Pada DAK Non Fisik mulai Tribulan II - Penambahan Anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi THL
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.152.065.800**	**1.401.835.800**	**249.770.000**	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.831.800	186.297.800	11.466.000	Penambahan Anggaran untuk : - Iuran Jaminan Kesehatan bagi THL - Pembayaran Pajak Kendaraan 5 Tahunan
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.150.000	52.150.000	-	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	925.084.000	1.163.388.000	238.304.000	Penambahan Anggaran untuk : 1. Iuran Jaminan Kesehatan bagi THL : 2. Rehab Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kertosono 3. Perencanaan Rehab Gedung Pertemuan (Planning Center)
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**520.199.620**	**1.019.311.620**	**499.112.000**	
A	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**115.004.620**	**153.504.620**	**38.500.000**	
1	Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal	50.775.000	50.775.000	-	
2	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	14.940.000	53.440.000	38.500.000	Penambahan Anggaran untuk Pembinaan SSK yang sudah ber MoU
3	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	49.289.620	49.289.620	-	
B	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**405.195.000**	**865.807.000**	**460.612.000**	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	137.597.500	137.609.500	12.000	Penambahan Anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi THL
2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	204.600.000	204.600.000	Penambahan Anggaran DAK Non Fisik
3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	267.597.500	523.597.500	256.000.000	- Penambahan Anggaran DAK Non Fisik - Perubahan Kode Rekening Belanja

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan Perubahan
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**9.288.939.300**	**14.069.620.300**	**4.780.681.000**	
A	**Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**787.531.000**	**2.727.531.000**	**1.940.000.000**	
1	Pengendalian Program KKBPK	-	140.000.000	140.000.000	Penambahan Anggaran DAK Non Fisik
2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	-	956.000.000	956.000.000	Penambahan Anggaran DAK Non Fisik
3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	300.000.000	300.000.000	Penambahan Anggaran DAK Non Fisik
4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	787.531.000	1.081.531.000	294.000.000	- Penambahan Anggaran DAK Non Fisik - Penambahan Anggaran Dana Insentif Fiskal (DIF) : PMT
5	Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	250.000.000	250.000.000	Penambahan Anggaran DAK Non Fisik
B	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**7.291.193.300**	**8.143.193.300**	**852.000.000**	
1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	7.291.193.300	8.143.193.300	852.000.000	Penambahan Anggaran DAK Non Fisik
C	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**910.215.000**	**2.123.646.000**	**1.213.431.000**	
1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.715.000	44.225.000	32.510.000	Penambahan Anggaran DAK Non Fisik
2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	886.000.000	2.031.321.000	1.145.321.000	- Penambahan Anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi THL - Penambahan Anggaran untuk Hr. Narasumber
3	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	12.500.000	12.500.000	-	
4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	35.600.000	35.600.000	- Penambahan Anggaran DAK Non Fisik - Penambahan Anggaran untuk Hr. Narasumber
D	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**300.000.000**	**1.075.250.000**	**775.250.000**	
1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	3.750.000	3.750.000	Penambahan Anggaran DAK Non Fisik

No.	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Keterangan Perubahan
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	300.000.000	1.071.500.000	771.500.000	Penambahan Anggaran DAK Non Fisik
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**777.500.000**	**6.534.811.000**	**5.757.311.000**	
A	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**777.500.000**	**1.179.811.000**	**402.311.000**	
1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	202.000.000	275.505.000	73.505.000	Penambahan Anggaran untuk : - Pakaian Wisuda Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dan Sekolah Lansia Tangguh (SELANTANG) - Kegiatan Wisuda Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH)
2	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	28.800.000	28.800.000	Penambahan Anggaran DAK Non Fisik
3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	350.500.000	350.500.000	-	
4	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-	300.000.000	300.000.000	- Penambahan Anggaran DAK Non Fisik - Perubahan Rincian Objek Belanja
5	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	225.000.000	225.006.000	6.000	Penambahan Anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi THL
C	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**-**	**5.355.000.000**	**5.355.000.000**	
1	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	2.550.000.000	2.550.000.000	Penambahan Anggaran DAK Non Fisik
2	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita	-	2.805.000.000	2.805.000.000	Penambahan Anggaran DAK Non Fisik

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, berikut Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat yang mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal tahun 2024.

Tabel 3.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 Pendukung Standar Pelayanan Minimal

No.	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1.	Urusan Pendidikan	Pendidikan anak usia dini	100%			Dinas Pendidikan
		Pendidikan dasar	100%			
		Pendidikan kesetaraan	100%			
2.	Urusan Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%			Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%			
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%			
		Pelayanan kesehatan balita	100%			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%			
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%			
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%			
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%			
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%			
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%			
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	100%			
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%			
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan

NIHIL

No.	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
						Pertanahan
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%			
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%			Satuan Polisi Pamong Praja
		Pelayanan informasi rawan bencana	100%			BPBD
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%			BPBD
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%			BPBD
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%			Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6.	Urusan Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%			
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%			
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%			

NIHIL

Tabel 3.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	

NIHIL

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, sehingga target kinerja tahun 2024 dapat dicapai dengan optimal.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
    b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator

b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Nganjuk, 20 Juni 2024

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

NAFHAN TOHAWI, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19721208 199803 1 005